

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam konteks ini, kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh faktor kesehatan, terutama kecukupan gizi. Gizi yang baik menjadi fondasi utama bagi tumbuh kembang anak serta produktivitas masyarakat di masa depan (Idrus et al., 2025). Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat, khususnya pada anak usia sekolah, memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.

Di Indonesia, permasalahan kekurangan gizi masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023), prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 21,5%, angka ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan target pemerintah sebesar 14% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, yang belum mendapatkan asupan gizi seimbang. Dampak dari permasalahan gizi ini tidak hanya memengaruhi kesehatan anak, tetapi juga kemampuan belajar dan produktivitas masyarakat di masa depan (Aji Muhawarman, 2025).

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program intervensi gizi, seperti Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), serta program terbaru yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional yang dirancang untuk menjamin pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

Program MBG merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai bagian dari janji kampanye yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik. Program ini diproyeksikan menjangkau hampir 83 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Pada tahun pertama pelaksanaannya, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp100 triliun dan berpotensi meningkat hingga Rp460 triliun pada tahun 2029 (Bhimanto Swastoyo, 2024). Tujuan utama program ini adalah meningkatkan status gizi, menurunkan angka stunting, serta mendorong peningkatan partisipasi sekolah, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.

Dalam pelaksanaannya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan ini menegaskan bahwa penyediaan makanan dalam Program MBG wajib memenuhi standar keamanan pangan, standar gizi, serta ketentuan jaminan

produk halal. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian konsumsi yang aman dan halal bagi seluruh penerima manfaat program.

Secara konseptual, Program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi, tetapi juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Melalui pelibatan pelaku usaha daerah, seperti petani, peternak, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia bahan pangan, program ini memiliki potensi menciptakan efek turunan (*trickle down effect*) bagi perekonomian. Dengan demikian, pelaksanaan MBG dapat memberikan dua manfaat utama, yaitu perbaikan kondisi gizi masyarakat serta penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM (Reni Saptati D.I., 2025).

Dalam perspektif ekonomi syariah, manfaat yang dihasilkan dari suatu kebijakan publik dapat dianalisis melalui konsep *maslahah*, yaitu segala bentuk kemanfaatan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Konsep ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar (*dharuriyyat*), kebutuhan pelengkap (*hajiyyat*), serta kebutuhan penyempurna (*tahsiniyyat*). Pelaksanaan Program MBG yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat sekaligus pemberdayaan ekonomi UMKM pada dasarnya sejalan dengan prinsip *jalb al-maslahah* (mendatangkan kemanfaatan) (Janna Ritonga, 2025).

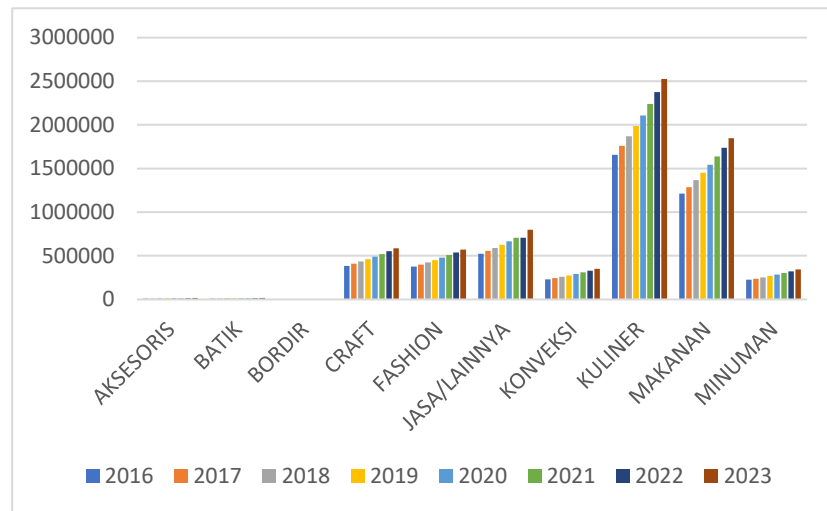
Program ini juga perlu memperhatikan aspek *dar'u al-mafasid* (menghindari kemudharatan), khususnya terkait dampak yang mungkin timbul terhadap pelaku UMKM yang tidak terlibat secara langsung atau memiliki

keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan program. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan Program MBG tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menciptakan kemaslahatan secara merata bagi masyarakat.

UMKM sendiri merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65,5 juta unit usaha, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Amalina, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan ekonomi masyarakat Indonesia sangat bergantung pada sektor UMKM, sehingga setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat daerah, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi UMKM terbesar di Indonesia. Berdasarkan Open Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, jumlah UMKM mengalami peningkatan signifikan dari 4.634.807 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 7.055.662 unit usaha pada tahun 2023 (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 2024). Peningkatan ini menegaskan peran vital UMKM dalam perekonomian daerah, khususnya usaha mikro yang sangat bergantung pada aktivitas ekonomi harian.

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah UMKM dalam Kategori Usaha di Jawa Barat



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat 2024

Berdasarkan grafik perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Barat, sektor kuliner dan makanan merupakan dua kategori usaha yang mengalami pertumbuhan paling pesat selama periode 2016–2023. Jumlah UMKM kuliner meningkat hingga mencapai sekitar 2,5 juta unit usaha pada tahun 2023, sementara UMKM kategori makanan meningkat mendekati 2 juta unit usaha pada periode yang sama (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pangan memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi masyarakat sekaligus sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang penyediaan makanan seperti Program MBG.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi UMKM yang besar sekaligus menjadi lokasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data resmi Dinas Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (2023), jumlah UMKM berizin di

wilayah ini mencapai 53.468 unit usaha (Dinas Koperasi, 2023). Besarnya jumlah UMKM tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sangat bergantung pada sektor usaha mikro dan kecil, khususnya yang bergerak di bidang pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Salah satu unit pelaksana Program MBG di Kabupaten Tasikmalaya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Linggamulya yang mulai beroperasi pada tanggal 18 Agustus 2025. SPPG Desa Linggamulya telah memenuhi ketentuan penyelenggaraan Program MBG sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, khususnya terkait jaminan produk halal. Hal ini dibuktikan dengan telah dimilikinya sertifikasi halal oleh SPPG Desa Linggamulya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain itu, dalam ketentuan teknis pelaksanaannya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mengarahkan penyerapan produk dari pelaku usaha lokal. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa penyediaan bahan baku dan makanan dalam program MBG melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra penyedia. Dalam hal ini, UMKM berperan sebagai unit penyedia atau dapur umum yang bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Perogram Makan Bergizi Gratis, 2025).

SPPG Linggamulya berperan sebagai pusat pengelolaan dan pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup wilayah Linggamulya dan sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan asisten lapangan SPPG Linggamulya, jumlah penerima manfaat yang dilayani saat ini mencapai sebanyak 2.643 orang yang terdiri dari peserta didik, balita, dan ibu hamil. Penerima manfaat tersebut merupakan kelompok sasaran program yang menjadi prioritas dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat di wilayah tersebut.

Jumlah penerima manfaat yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program MBG di wilayah kerja SPPG Desa Linggamulya membutuhkan dukungan logistik dan penyediaan bahan pangan dalam jumlah besar serta berkesinambungan. Kebutuhan logistik ini tercermin dari tingginya volume bahan baku yang digunakan setiap bulan dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Haji Nur selaku mitra SPPG Linggamulya, diperoleh informasi mengenai estimasi kebutuhan bahan baku per bulan dalam pelaksanaan Program MBG.

Secara umum, kebutuhan bahan pangan dalam Program MBG didominasi oleh bahan pangan pokok dan sumber protein nabati. Dalam hal ini, beras tercatat sebagai bahan dengan kebutuhan tertinggi, yaitu sekitar 2.640 kg per bulan, yang menunjukkan perannya sebagai komponen utama dalam menu MBG. Selain itu, kebutuhan bahan pangan lain yang juga cukup besar meliputi tempe sekitar 2.160 kg per bulan, sayuran sekitar 1.800 kg per bulan, serta tahu sekitar 1.440 kg per bulan.

Sementara itu, kebutuhan bahan pangan lainnya seperti buah-buahan sekitar 600 kg per bulan, telur, ayam, dan ikan masing-masing sekitar 400 kg per bulan, minyak goreng sekitar 400 kg per bulan, susu sekitar 736 kg per bulan, serta bumbu dapur sekitar 400 kg per bulan berada pada jumlah yang lebih rendah, namun tetap bersifat rutin dan berkelanjutan.

Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan permintaan pasar yang relatif stabil di tingkat lokal, sehingga pelaksanaan Program MBG diharapkan tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan program.

Dalam pelaksanaannya, SPPG Desa Linggamulya melibatkan UMKM lokal dari ketiga wilayah penerima manfaat sebagai bagian dari rantai pasok Program MBG. UMKM lokal tersebut berperan sebagai penyedia bahan baku pangan, sehingga menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal melalui peningkatan permintaan bahan pangan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Program MBG yang mengarahkan pelibatan pelaku usaha lokal, seperti UMKM, koperasi, dan BUMDes, dalam penyediaan bahan baku dan makanan program.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SPPG Linggamulya, keterlibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan yang mendorong pemberdayaan UMKM

lokal dengan realitas di lapangan, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Basit dan Hikmah Ramadani (2025) menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menurunkan beban ekonomi keluarga miskin, membuka peluang usaha bagi UMKM lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi. Namun, temuan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi awal di wilayah SPPG Linggamulya, di mana masih terdapat UMKM yang belum mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan akibat keterbatasan kapasitas produksi. Perbedaan ini menunjukkan adanya *gap* empiris mengenai sejauh mana Program MBG benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi UMKM, khususnya di wilayah pedesaan.

Selain itu penelitian Alysia Maryam Kahar dkk. (2025) di Kota Makassar menunjukkan bahwa UMKM mitra Program MBG mengalami peningkatan jumlah pelanggan dan omzet usaha. Namun, kajian empiris yang secara khusus menganalisis dampak Program MBG terhadap pendapatan UMKM lokal di wilayah pedesaan masih relatif terbatas.

Secara teori ekonomi, peningkatan permintaan (*demand*) terhadap suatu barang atau jasa seharusnya berdampak pada peningkatan harga dan pendapatan pelaku usaha (Naura Aldareta et al., 2025). Dalam konteks pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tingginya kebutuhan bahan baku pangan berpotensi meningkatkan pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasok program.

Namun, berdasarkan temuan awal di lapangan, belum seluruh UMKM lokal merasakan peningkatan pendapatan sejak adanya Program MBG. Adanya perbedaan antara harapan teoritis dan realitas empiris tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Adapun kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya menganalisis dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pendapatan UMKM lokal dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program dilaksanakan, baik dari aspek materiil maupun dari sisi peningkatan taraf kehidupan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di sekitar SPPG Linggamulya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak terhadap pendapatan UMKM lokal di Desa Linggawangi dan Desa Linggamulya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pendapatan UMKM Lokal. Adapun penelitian ini berjudul “Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sekitar SPPG Linggamulya Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Linggamulya telah melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia bahan baku pangan, namun sejauh ini belum diketahui secara empiris sejauh mana program tersebut berdampak terhadap pendapatan UMKM lokal yang terlibat dalam pelaksanaannya.
2. Keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok Program MBG belum sepenuhnya merata, karena keterbatasan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku, sehingga sebagian kebutuhan program masih dipenuhi oleh pemasok dari luar desa. Kondisi ini berpotensi memengaruhi besarnya manfaat ekonomi yang diterima UMKM lokal.
3. Perbedaan skala usaha, jenis usaha, dan kapasitas produksi UMKM lokal yang terlibat dalam Program MBG diduga menyebabkan variasi dampak terhadap pendapatan UMKM, namun hingga saat ini belum terdapat kajian kuantitatif yang mengukur dampak tersebut secara terstruktur di tingkat desa.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada analisis dampak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang terlibat dalam penyediaan bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Linggamulya.

2. UMKM yang menjadi objek penelitian adalah UMKM lokal yang berdomisili di Desa Linggawangi, Desa Linggamulya dan Desa Jaya Mukti, serta pernah atau sedang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG sebagai pemasok bahan baku, seperti beras, sayuran, buah-buahan, roti, dan bahan pangan lainnya.
3. Dampak Program MBG yang dianalisis dalam penelitian ini hanya difokuskan pada aspek pendapatan UMKM dengan mempertimbangkan adanya dampak lanjutan sebagai temuan pendukung.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner/wawancara kepada pelaku UMKM dan data sekunder yang berasal dari instansi terkait, dengan periode pengamatan pada saat Program MBG telah berjalan di SPPG Linggamulya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme kerja sama antara SPPG dengan UMKM lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pendapatan UMKM di Sekitar SPPG Linggamulya?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pendapatan UMKM dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekitar SPPG Linggamulya?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk dan mekanisme kerja sama antara SPPG dengan UMKM lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Untuk menganalisis dampak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pendapatan UMKM di sekitar SPPG Linggamulya.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pendapatan UMKM dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekitar SPPG Linggamulya.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi pembangunan dan ekonomi UMKM, khususnya terkait dampak kebijakan publik di bidang pangan dan gizi terhadap pendapatan UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Pengelola MBG

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya terkait keterlibatan UMKM lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara optimal.

b. Bagi UMKM Lokal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak Program MBG terhadap pendapatan UMKM lokal, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan usaha.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan publik dan pemberdayaan UMKM, khususnya di wilayah pedesaan.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan						
		Sept 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026
1	Penyusunan Proposal Penelitian							
2	Sidang Proposal Penelitian							
3	Revisi Sidang Proposal							
4	Penelitian							
5	Pengolahan Data dan Bimbingan							
6	Sidang Penelitian							
7	Revisi Sidang Penelitian							

Sumber: Olahan Peneliti 2026

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan dasar dan arah penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menguraikan landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep Program Makan Bergizi Gratis (MBG), konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendapatan UMKM, serta teori-teori ekonomi yang relevan, seperti teori permintaan dan teori multiplier effect. Selain itu, bab ini juga memuat hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan pembahasannya. Pembahasan mencakup gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekitar SPPG Linggamulya, kondisi UMKM lokal sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MBG, serta analisis dampak Program MBG terhadap pendapatan UMKM lokal di Desa Linggawangi dan Desa Linggamulya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis berdasarkan temuan penelitian, baik bagi pemerintah, pengelola Program MBG, pelaku UMKM, maupun bagi penelitian selanjutnya.

